

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia ialah negara berkembang yang menitik beratkan perkembangan ekonomi serta pembangunan ke arah yang lebih baik. Hal ini telah dimulai dengan didapatinya bentuk usaha-usaha berskala besar ataupun kecil yang bermacam-macam. Salah satu tipe usaha yang ada di Indonesia ialah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (yang selanjutnya disebut UMKM). UMKM adalah salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dalam perekonomian nasional (Kusuma dan Lutfiany, 2019).

Penyebab hal tersebut adanya keragaman budaya, agama, adat, dan wilayah yang terbagi atas pulau-pulau dan juga memiliki sumber daya yang beragam pula, sehingga perkembangan UMKM di Indonesia sangat cepat dan pesat. Kebanyakan UMKM tumbuh pada daerah yang kaya akan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang memadai dan tingkat pengunjung daerah menjadi tolak ukur berkembangnya UMKM. Pertumbuhan pelaku UMKM yang terus bertambah mencerminkan kemampuan yang besar apabila sanggup dikelola dengan baik untuk menopang perekonomian negara (Pradita dkk, 2019).

UMKM memiliki peran dalam perekonomian Indonesia yaitu menghasilkan output. Namun pelaku UMKM pada kenyataannya masih sangat minim akan pentingnya pencatatan akuntansi. Penerapan akuntansi dalam sebuah usaha dianggap tidak terlalu penting oleh pelaku UMKM. Masih banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan maupun menggunakan sistem akuntansi dalam mencatat

transaksi yang terjadi di dalam pengelolaan suatu usaha yang sedang dijalankan (Putri dan Anggraini, 2016). Kendala yang menjadikan pelaku UMKM untuk berkembang disebabkan karena susah dalam pengajuan akses pengkreditan penambahan modal. Ribuan UMKM di Indonesia dianggap tidak bankable karena pelaku UMKM masih buta terhadap laporan keuangan, banyak juga pelaku UMKM yang laporan keuangan bercampur dengan keuangan pribadi. Laporan keuangan sangat penting karena sebagai bukti untuk melihat usaha tersebut sehat atau tidak. Sehingga, pihak bank dapat menilai dari laporan tersebut. Dari sisi internal, pelaku UMKM mempunyai raport tentang usahanya, apakah membaik atau menurun. Untuk kepentingan luar lembaga keuangan atau perbankan mempermudah mengidentifikasi apakah layak atau tidak mendapat kredit (Arifin, 2017).

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 1004,132 Km<sup>2</sup> dan terdiri atas 16 Kecamatan. UMKM di Kabupaten Jepara mempunyai jenis yang beragam. Data terakhir yang diterima Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara jumlah UMKM adalah sebanyak 80.050 unit usaha yang tersebar diberbagai kecamatan di Kota Jepara yang terdiri dari:

**Tabel 1.1****Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menurut sektor ekonomi tahun 2020 di Kabupaten Jepara**

Sektor Ekonomi	Jumlah Unit			Total Unit Usaha
	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
Pertanian, Peternakan, Kehutanan , dan Perikanan	19.635			<b>19.635</b>
Pertambangan dan Penggalian		81		<b>81</b>
Industri Pengolahan	26.797	2.333	106	<b>29.236</b>
Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.745	5		<b>1.750</b>
Bangunan		125	83	<b>208</b>
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	26.900	1.266	58	<b>28.314</b>
Pengangkutan dan Komunikasi	129	148		<b>277</b>
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan		21		<b>21</b>
Jasa-jasa swasta	528			<b>528</b>
<b>Total</b>	<b>75.824</b>	<b>3.979</b>	<b>247</b>	<b>80.050</b>

Sumber: Dinas Koperasi UKM Tenagakerja dan Transmigrasi Kab. Jepara Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa banyak UMKM yang tumbuh di Kabupaten Jepara, untuk itu berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara bersama CSR PLN Tanjung Jati B untuk meningkatkan perkembangan UMKM di Kabupaten Jepara. Salah satunya upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan pelatihan manajemen keuangan. Pelatihan manajemen

keuangan di selenggarakan di rumah kreatif BUMN Jepara Jl R.A Kartini No.23 Kauman Jepara, senin (30/9) diikuti oleh beberapa UMKM di Jepara yang sudah bergabung dengan narasumber dari Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. Pelatihan yang diberikan yaitu penyusunan laporan keuangan dengan tujuan agar pelaku UMKM di Kabupaten Jepara dapat menyediakan informasi posisi keuangan, mengetahui kinerja, dan mempermudah mereka dalam pengambilan keputusan (<https://plntanjungjatib.blogspot.com,> 2019). Namun meskipun sudah diberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai penyusunan laporan keuangan yang diharapkan pelaku UMKM terkait hal tersebut mereka diberikan modul dan diberikan pelatihan secara berkelanjutan. Karena pelatihan maupun sosialisasi yang sudah-sudah bersifat seminar sehari dan hanya memberikan teori, namun kurang dalam praktiknya. Akibatnya masih banyak pelaku UMKM di Jepara yang belum menyusun laporan keuangan dengan baik. Bahkan masih banyak yang tidak melakukan pencatatan. Pelaku UMKM hanya melakukan pencatatan sebatas pendapatan dan pengeluaran. Alasan lain UMKM di Kabupaten Jepara masih enggan membuat laporan keuangan karena belum mengetahui manfaat yang didapat. (Silvi dan Azmi, 2019).

Demi mempermudah UMKM dan terlaksananya kebutuhan informasi untuk UMKM maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang mudah dipahami dan sederhana. Penerbitan SAK EMKM juga dilandasi kesadaran akan besarnya dukungan sektor tersebut terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang terbukti bisa bertahan di saat krisis serta mampu



tumbuh pesat ketika menggeliat. SAK EMKM dapat membantu pelaku UMKM melalui laporan keuangan yang telah dibuat dengan menggunakan aplikasi buku sederhana, menggantikan metode pencatatan keuangan secara tradisional. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehan. Kehadiran SAK EMKM diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan pelaku UMKM di Indonesia mendapatkan pendanaan dari berbagai lembaga keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Faktor-faktor diduga dapat mempengaruhi penerapan SAK EMKM yaitu sistem pencatatan akuntansi, pemahaman akuntansi, kesiapan pelaku UMKM, persepsi UMKM, *organizational change readiness*, dan pendidikan.

Faktor yang pertama yaitu sistem akuntansi, menurut Margani (2007) dalam Pradita, dkk (2019) yang menjadi kelemahan pelaku UMKM adalah pelaku UMKM tidak menguasai dan tidak menerapkan sistem keuangan yang memadai, dari beberapa UMKM belum memiliki serta menerapkan pencatatan akuntansi dengan ketat dan disiplin dengan pembukuan yang memiliki aturan yang sistematis. Anggapan pelaku UMKM bahwa informasi akuntansi tidak penting, selain sulit diterapkan hal tersebut membuang waktu dan biaya. Pelaku UMKM berfikir bagaimana mendapatkan laba yang banyak tanpa bersusah payah menerapkan akuntansi, penelitian mengenai sistem pencatatan akuntansi yang telah dilakukan Rawun dan Tumilar (2019) menunjukkan hasil sistem pencatatan akuntansi berpengaruh negatif terhadap implementasi SAK EMKM, karena sistem yang sederhana untuk dapat dipahami oleh setiap UMKM tentunya perlu adanya

pemahaman siklus akuntansi. Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pradita, dkk (2019), Elisabeth dan Sembiring (2018), dan Aulia (2018) menyatakan sistem pencatatan berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM.

Faktor yang kedua yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM yaitu pemahaman akuntansi. Pemahaman akuntansi dimiliki oleh orang yang pandai dan mengetahui dengan baik mengenai akuntansi. Orang dianggap paham terhadap akuntansi jika mengerti dan pintar tentang cara proses akuntansi dilakukan sampai menjadi laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan tersebut juga berpedoman prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM, penelitian mengenai pemahaman akuntansi yang dilakukan Putra (2018) berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Semakin tinggi pemahaman akuntansi pemilik UMKM maka akan semakin tinggi penerapan SAK EMKM pada usaha. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Diani (2009) dalam Pradita, dkk (2019) menyatakan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM, semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Lutfiany dan Kusuma (2018) dan Parhusip dan Herawati (2020) bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Lestari (2020) pemahaman akuntansi berpengaruh negatif terhadap implementasi SAK EMKM, hal tersebut disebabkan UMKM belum pernah tahu mengenai standar akuntansi karena mereka belum pernah

mendapatkan sosialisasi sehingga mereka belum memahami penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM dan tidak adanya karyawan yang bertanggung jawab untuk membuat pembukuan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM adalah kesiapan pelaku UMKM, kendala kesiapan pelaku UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM yaitu kesadaran mengenai pentingnya laporan keuangan yang belum dimiliki oleh pelaku UMKM, tidak adanya sosialisasi, dan pelatihan mengenai SAK EMKM maupun masih rendahnya pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM terhadap SAK EMKM Sholikin dan Setiawan (2018) penelitian yang dilakukan tersebut SAK EMKM berpengaruh positif terhadap kesiapan UMKM. Sejalan dengan penelitian Pradita, dkk (2019) dan Sari dan Dewi (2019) bahwa tingkat kesiapan berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM. Hasil penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa kesiapan pelaku UMKM berpengaruh negatif terhadap implementasi SAK EMKM karena UMKM belum mengetahui adanya SAK baru yaitu SAK EMKM sehingga mereka belum siap karena belum memiliki pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAK (Sholikin dan Setiawan, 2018).

Faktor keempat yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM yaitu persepsi UMKM, persepsi adalah sebuah pandangan seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa atau obyek. Persepsi atau stimulus yang baik maka akan membuat seseorang dapat menerima dan mengevaluasi untuk membenahi usaha agar lebih baik dari sebelumnya. Penelitian mengenai persepsi UMKM yang dilakukan oleh Kusuma dan Lutfiany (2018) menyatakan persepsi UMKM berpengaruh positif

terhadap implementasi SAK EMKM. Semakin baik persepsi maka akan semakin baik juga dalam menggunakan akuntansi yang memiliki tujuan menghasilkan pelaporan keuangan dan informasi untuk keputusan usaha. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tama, dkk (2018), Whardani dan Febryanti (2018) menyatakan persepsi pengusaha UMKM berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Herawati dan Parhusip (2020) menyatakan bahwa persepsi UMKM berpengaruh negatif terhadap penerapan SAK EMKM karena SAK EMKM tidak memudahkan UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan mendapatkan penambahan modal dari investor.

Faktor kelima yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM adalah *organizational change readiness* atau kesiapan organisasi untuk berubah yaitu suatu proses yang harus dijalankan oleh organisasi untuk kemajuan yang diinginkan pada masa yang akan datang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Kesiapan organisasi berubah dipengaruhi oleh sumber daya manusia, modal, dan faktor lingkungan. Penelitian ini dilakukan oleh Tama, dkk (2018) mengenai *organizational change readiness* atau kesiapan organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM.

Faktor terakhir yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM adalah pendidikan, pendidikan memiliki pengaruh terhadap meningkatnya kemampuan untuk menyerap pengetahuan. Penelitian yang dilakukan Alam dan Rita (2021) menyatakan latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM, berhasilnya pelaku UMKM bergantung pada pendidikan dan



kemampuan belajar dalam lingkungan usaha. Pelaku UMKM dituntut mengerti pekerjaan yang akan dilakukan karyawannya. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang Lutfiany dan Kusuma (2018), Febriyanthi dan Wardhani (2018) bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan di lakukan Parhusip dan Herawati (2020) dan penelitian yang dilakukan Putra (2018) pendidikan berpengaruh negatif terhadap penerapan SAK EMKM karena pendidikan yang tinggi tidak menjamin pelaku UMKM untuk menerapkan SAK EMKM.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Pradita, dkk (2019). Adapun perbedaan penelitian ini menambah variabel-variabel independen yaitu persepsi UMKM, *organizational change readiness*, dan pendidikan. Kedua, penelitian ini menggunakan sampel UMKM yang berada diseluruh wilayah Kabupaten Jepara. Sedangkan penelitian Pradita, dkk (2019) menggunakan sampel seluruh UMKM di Kabupaten Gianyar.

Alasan menambah variabel persepsi UMKM karena persepsi merupakan cara pandang seseorang atau pendapat pengusaha mengenai laporan keuangan, jika pelaku UMKM memiliki persepsi kemudahan dan kegunaan dalam menilai SAK EMKM pada usahanya maka pengusaha akan merasa mudah mengelola keuangan dan informasi di dalam pengambilan keputusan jalannya usaha. Persepsi ini berkaitan dengan penggunaan SAK EMKM pembukuan atau pencatatan sampai pada laporan keuangan tidak menyulitkan pengusaha UMKM dalam memahami dan membuat sebuah laporan yang berguna, maka dari itu penambahan variabel

persepsi UMKM diharapkan nantinya dapat mempengaruhi dalam penerapan SAK EMKM (Tama dkk, 2018).

Alasan penambahan variabel *organizational change readiness* atau kesiapan organisasi untuk berubah karena hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran organisasi terkait dengan kompleksitas dan semakin tingginya tingkat transaksi usaha sehingga diharapkan dengan semakin tingginya kesiapan organisasi untuk berubah maka mendorong pelaku UMKM untuk berfikir dan belajar terkait solusi untuk menghadapinya (Tama dkk, 2018). Semakin siap organisasi menerima perubahan maka pelaku UMKM akan memikirkan pentingnya suatu pembukuan dan pelaporan keuangan untuk membantu dalam pengelolaan aset dan penilaian kinerja keuangan.

Alasan penambahan variabel pendidikan adalah karena muncul anggapan keahlian serta kemampuan pelaku UMKM dalam penggunaan informasi keuangan ditentukan oleh pendidikan seseorang (Kusuma dan Lutfiany, 2018). Semakin tingginya pendidikan semakin mereka mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan, diharapkan dengan pendidikan pelaku UMKM akan melakukan pembukuan dan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dengan itu pendidikan diharap nantinya dapat mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah.

Berbagai informasi yang didapat dari beberapa sumber diatas menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Jepara mengalami kemajuan serta mendapat dukungan dari pemerintah maupun CSR perusahaan untuk pengembangan UMKM, namun masih banyak pelaku UMKM belum melakukan

pencatatan sesuai dengan standar yang berlaku. Maka penting dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem pencatatan akuntansi, pemahaman akuntansi, kesiapan pelaku UMKM, persepsi UMKM, *organizational change readiness*, dan pendidikan mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul **“Pengaruh Sistem Akuntansi, Pemahaman Akuntansi, Kesiapan Pelaku UMKM, Persepsi UMKM, *Organizational Change Readiness*, dan Pendidikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (Studi pada UMKM Kabupaten Jepara)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Untuk memfokuskan penelitian agar permasalahan yang akan diteliti mempunyai ruang lingkup dan arah yang jelas maka peneliti memberikan batasan masalah, adapun batasan masalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (Y). Sedangkan variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi (X1), pemahaman akuntansi (X2), kesiapan pelaku UMKM (X3), persepsi UMKM (X4), *organizational change readiness* (X5), dan pendidikan (X6).
2. Objek penelitian adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem akuntansi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah?
2. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah?
3. Apakah kesiapan pelaku UMKM berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah?
4. Apakah persepsi UMKM berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah?
5. Apakah *organizational change readiness* berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah?
6. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai jawaban yang dikehendaki dalam rumusan masalah. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem akuntansi terhadap penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah.



3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesiapan pelaku UMKM terhadap penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi UMKM terhadap penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *organizational change readiness* terhadap penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bacaan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dan menambah ilmu pengetahuan mengenai sistem akuntansi, pemahaman akuntansi, kesiapan pelaku UMKM, persepsi UMKM, *organizational change readiness*, dan pendidikan terhadap penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah.

2. Bagi pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Jepara

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan pedoman atau acuan dalam menerapkan pembuatan laporan keuangan yang baik sehingga UMKM dapat menggunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan untuk keberlangsungan usaha yang

dianggap perlu bagi UMKM, laporan keuangan yang baik sebagai akses untuk peminjaman pada bank.

### 3. Bagi Investor

Dapat memberikan pemahaman bagi investor mengenai penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah dalam suatu UMKM sehingga mampu menentukan keputusan untuk berinvestasi dengan baik.

